



Dewan: Penataan Permukiman Jangan Keluar Spek

JOGJA - Komisi C DPRD Kota Jogja mendorong penataan kawasan kumuh bisa digarap maksimal oleh Pemkot Jogja. Terlebih yang berada di kawasan bantaran sungai.

Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Bambang Seno Baskoro mengatakan, penataan bantaran sungai harus menjadi atensi bagi pemerintah. Sebab permukiman kumuh mayoritas berada di kawasan tersebut.

"Pembangunan kawasan pinggir sungai menjadi salah satu prioritas pembangunan, dalam rangka pengentasan kawasan kumuh perkotaan," ujar Seno di sela inspeksi mendadak (sidak) pembangunan talut Sungai Code di RW 06, Terban, Gondokusuman kemarin (20/10).

Proyek pembangunan talut itu diketahui sekaligus penataan permukiman bantaran sungai. Sebab akan menerapkan skema mundur tiga meter dari bibir sungai. Supaya bisa difungsikan sebagai jalan in-



TURUN LAPANGAN: Jajaran Komisi C DPRD Kota Jogja saat melakukan sidak pembangunan talut Sungai Code di RW 06, Terban, Gondokusuman kemarin (20/10). speksi untuk armada ambulans atau pemadam kebakaran.

Seno menyebut, melalui sidak itu memastikan proyek penataan bantaran benar-benar dilaksanakan secara optimal oleh pengembang. Termasuk mengawal spesifikasi konstruksi agar sesuai standar.

"Kami tekankan betul kepada penyedia jasa maupun dinas terkait

proses sidak itu pihaknya tidak menemukan pelanggaran. Namun legislatif menyoroti soal proses proyek yang belum memenuhi target.

Kendati begitu, dia memahami kendala tersebut. Lantaran diakibatkan kondisi cuaca hujan deras. Sehingga berdampak pada sulitnya penggunaan alat berat.

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP-UPKP) Kota Jogja Sigit Setiawan membeberkan, sisa kawasan kumuh berkisar 50,7 hektare. Sementara untuk penyelesaian setiap tahunnya ditarget bisa mencapai 8 hektare.

Adapun pengentasan kawasan kumuh di Kota Jogja harus selesai pada 2031. Sesuai dalam SK Wali Kota Jogja Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. (**inu/wia/by**)

agar jangan sampai keluar spek," tegasnya.

Menurut politisi Partai Golkar itu, pengawasan spek konstruksi penting karena berkaitan dengan kekuatan infrastruktur ke depannya. Legislatif tidak ingin ada kerusakan kembali ketika terjadi cuaca ekstrem.

Seno mengungkapkan, dalam

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005